

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA
PANTAI SERUNI DI KABUPATEN BANTAENG**

Disusun dan Diajukan oleh

ULIL AMRI SYAM

Nomor Stambuk : 1056 4006 9810



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA
PANTAI SERUNI DI KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Serjana Ilmu Pemerintahan



Disusun Dan Dijukan Oleh

ULIL AMRI SYAM

No Stambuk : 105640069810

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN

Judul : Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat
Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di
Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Ulil Amri Syam

Nomor Stambuk : 1056400 698 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mappamiring, M.Si


Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan


Fisipol, Universitas Muhammadiyah Makassar


Ilmu pemerintahan

Ir. H. Saleh Molla, MM

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar , berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 26 Agustus 2017.

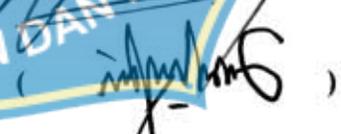


TIM PENILAI

Ketua:  Ir. H. Saleh Molla, MM

Sekretaris:  Dr. Burhanuddin, S.sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si 
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.Si 
3. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si 
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si 

PERSETUJUAN

Judul : Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat
Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di
Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Ulil Amri Syam

Nomor Stambuk : 1056400 698 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Ir. H. Saleh Molla, MM

A.Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ULIL AMRI SYAM

Nomor Stambuk : 105640069810

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar April 2016

Yang Menyatakan

Ulil Amri Syam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“Assalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah S.W.T, atas Rahmat dan Taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di Kabupaten Banteng” dapat diselsesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Dr.H. Mappamiring, M.Si sebagai Pembimbing I dan Rudi Hardi,S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Doa semoga Allah Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya, beliau telah berperan sebagai orang tua akademik bagi saya.
4. Segenap Dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini. Segenap staf tata usaha fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
5. Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantaeng, staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, Dinas Kelurahan Pallantikang, Para Petugas Laskar Kebersihan, Para Tokoh Masyarakat dan petugas pengelola

objek wisata Pantai Seruni yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian hingga selesainya karya ini disusun.

6. Buat orang tuaku tercinta Syamsuddin dan St. Rosmah atas segala bimbingan, kasih sayang yang tulus, jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa saya kerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud serta doa semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungannya, dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi serta arahan-arahan selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
7. Buat adikku Putri, Fahmi, idham dan kakakku Wawan dan Wiwik tercinta yang tak henti-hentinya memberi dukungan, semangat dan do'a
8. Buat semua teman yang selalu menemani dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua pengorbanan yang diberikan
9. Segenap rekan-rekan Akademik Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 2010 kelas A, Adi Saputra, Albar Maulana, Arpandi, Abdullah Said, Akbar Abu, Ryan Adriadi, Mustari Akbar, Rahmat, Hikmatul Khairil Nur, Suherlin Lewa, Darmawanti, Kartini, Syahriana, Rinianti, Rini Febrianti, Fadliah, Marniati yang banyak membantu dalam melengkapi data penelitian penulis ditengah kesibukannya
10. Buat sahabat-sahabat yang sudah saya anggap saudara Wawan, Nawir, Andang, Ahmad Amiruddin, Asri, Muhammad Dirga Ansari, Asmaul

Husna, Marni, Nastiti, yang sampai sekarang senantiasa membantu dan memberikan masukan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.

11. Buat Adi Saputra, Syahriana, Rinianti, dan Akbar yang selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahuwataala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Juni 2016

Ulil Amri Syam



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kemitraan	7
B. Konsep Pengelolaan Pariwisata.....	11
C. Konsep Masyarakat.....	21
D. Konsep Pemerintahan Daerah.....	27
E. Kerangka Fikir.....	33
F. Fokus Penelitian	35
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Prosedur Pengumpulan Data	39

E. Informan	40
F. Teknik analisis Data	41
G. Pengabsahan Data.....	42
H. Jadwal Penelitian	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	44
1. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	44
2. Profil Kelompok Masyarakat (Laskar Kebersihan)	53
3. Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng.....	54
B. Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng.....	56
1. Kemitraan <i>Partnership</i>	56
2. Kemitraan <i>Linear Collaborative</i>	62
3. Kemitraan <i>Mutualistik</i>	65
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Halaman
Tabel 1 Tabel Data Informan	41
Tabel 2 Keadaan Pegawai Berdasarkan jenis Kelamin.....	51
Tabel 3 Kwadaan Pegawai Berdasarkan Eselonisasi.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Negara. Memasuki abad 21 perhatian terhadap pariwisata sudah sangat meluas, hal ini terjadi karena pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi negara-negara yang menerima kedatangan wisatawan (*tourist receiving countries*). Karena itu, pembangunan pariwisata memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, social, dan lingkungan.

Peran pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerja sama antar Negara (persahabatan antar bangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan mancanegara).

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak terkecuali di Kabupaten Bantaeng, yang memiliki potensi-potensi alam yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa.

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam, Kabupaten Bantaeng sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi ikon pariwisata nasional seperti Bali apabila objek wisata Pantai Seruni dikelola dengan baik. Pantai Seruni sedikit banyaknya punya pengaruh positif juga negatif terhadap pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantaeng.

Pantai Seruni terletak di tengah-tengah perkotaan Kabupaten Bantaeng. Mengingat Objek Wisata Pantai Seruni ini masih baru, maka fasilitas-fasilitas menunjang masih terbatas di objek wisata ini. Pemerintah harusnya cepat membenahi hal tersebut, karena objek wisata Pantai Seruni ini sudah banyak menarik minat wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Jika Pemerintah ingin menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai destinasi atau daerah tujuan wisata baru di Indonesia, maka pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni tersebut.

Pemerintah di kabupaten yang berjuluk Butta Toa ini telah mengambil langkah yang tepat mengembangkan daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Termasuk potensi wisata pantai maupun alam pegunungannya yang subur dan indah di lembah Gunung Lompo battang. Sebagaimana diketahui, dalam kepemimpinan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, (periode pertama 2008-2013) (periode kedua 2013-2018), pemacuan pembangunan fisik diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui motto *The New Bantaeng*. Dilakukan melalui pentitik berat pengembangan potensi wilayah yang dibagi sesuai kondisi dan potensi wilayahnya yang tiga

dimensi – wilayah laut/pesisir, tanah dataran, dan wilayah pegunungan yang mencapai ketinggian sampai 1.300 dpl, dan letaknya pun sangat strategis pintu gerbang yang ada pas hanya beberapa meter di bibir jalan Propinsi sehingga memudahkan anda untuk melihat tempat ini.

Berdasarkan visi dan misi yang diemban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas pokoknya, maka disadari bahwa lingkungan eksternal sangat berpengaruh, mengingat setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dalam hal pengelolaan objek wisata diperlukan peran serta dari pihak-pihak lain khususnya masyarakat Bantaeng pada umumnya yang tergolong dalam satuan kerja yang di sebut Laskar Kebersihan dan pastinya jg ada campur tangan dari LSM (Lembaga Sosial masyarakat) sehinga keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, khususnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pada akhirnya kebijakan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata bagi para pengelola objek wisata tersebut.

Selanjutnya, diperlukan *networking* (kerja sama) antar daerah dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif/keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan yang bersifat positif dan saling memperkuat antar daerah, melalui manfaat: *sharing of experiences*, bahwa dengan adanya

kerjasama, maka masing-masing daerah akan dapat belajar atau berbagi pengalaman untuk saling memanfaatkan, dengan demikian kesalahan atau kesulitan yang telah dialami tidak akan terulang kembali, *Sharing of Benefits*, melalui adanya kerjasama yang baik, maka potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah akan jelas terbudidayakan secara proporsional, *sharing of burdens*, sejalan dengan prinsip *Sharing of Benefits*, maka biaya operasional dalam usaha bersama tentunya juga akan dipikul secara bersama-sama, secara profesional pula.

Namun kenyataannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng belum mampu menjalin sinergitas dengan lingkungan eksternal secara harmonis sehingga pengelolaan kepariwisataan masih terkesan setengah hati. Di sisi lain, sebagian aparat/pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bantaeng bersifat apatis dan tidak akuntabel terhadap beban tugas yang diberikan sehingga masyarakat pengguna jasa layanan pariwisata sering komplain, merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Kondisi seperti itu terjadi karena dipengaruhi oleh belum adanya kepercayaan penuh terhadap pihak swasta/institusi lain dalam pengelolaan kepariwisataan. Dan adanya sikap ketidakpuasan aparat pariwisata terhadap pimpinan yang terkesan hanya fokus pada salah seorang tertentu saja (*one man show*) yang dianggap mampu bekerja sementara yang lainnya dianggap tidak kompeten. Dalam hal ini pimpinan tidak member kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara konstruktif kepada semua aparat atau pegawainya dalam

proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan pariwisata tersebut.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik mengambil judul **“Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kemitraan Pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dan Kelompok Masyarakat (Laskar Kebersihan) dalam mengelola Objek Wisata Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Kemitraan pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan kelompok masyarakat (laskar kebersihan) dalam mengelola objek wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Objek Wisata Pantai seruni di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan dari keilmuan :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pemerintahan.

2. Manfaat dari praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam pemahaman.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Sulistiyani (2004) ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi:

Kemitraan *Partnership*. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan.

Kemitraan *Linear Collaborative*. Dalam kemitraan ini, tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak, namun tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling ter subordinasi.

Kemitraan *mutualistik*. Dalam Kemitraan ini persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat di terjemahkan pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

1. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dan tujuan dalam pelaksanaannya, wibisono (2007), yaitu:

- a. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*) pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
- b. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
- c. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional
- e. Memperluas lapangan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

2. Pola-Pola Kemitraan

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karna dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan di dasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut wibisono (2004), kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau kelompok masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, di antaranya:

- a. Pola kemitraan kontra produktif. Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar besarnya. Focus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau kelompok masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.
- b. Pola kemitraan semi produktif. Dalam scenario ini pemerintah dan komunitas atau kelompok masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif

atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

- c. Pola kemitraan produktif. Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *common interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan biasa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resource based partnership* dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership* program.

B. Konsep Pengelolaan Pariwisata

1. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan pengertian pengelolaan sebagai berikut :

- a. (1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan

(4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.

- b. Manajemen adalah Suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

- c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

- d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar

pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana

2. Pengertian Pariwisata

Pitana I Gede, dkk, 2009. Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar,berulang-ulang atau berkali-kali.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafka ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antar orang baik dari negara yang sama atau antarnegara atau hanya dari daerah geografis yang terbatas. Di dalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu di daerah lain atau negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan, meskipun pada perkembangan selanjutnya batasan “memperoleh penghasilan” masih kabur.

The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST) mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (stay) para pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap (Hunzeiker& Krapf, 1942).

Gunawan, M.P. dalam Santoso, 2000 ; 115 mengemukakan bahwa pengertian pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang ke dan tinggal di tempat lain di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk waktu kurang dari satu tahun terus-menerus, dengan maksud bersenang-senang, berniaga dan keperluan-keperluan lainnya.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah.

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata jika memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

1. Harus bersifat sementara.
2. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan.
3. Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran.

Kepariwisataan adalah fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya-fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama

wisatawan, pemerintah dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat.

Batasan yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf, dua guru besar Swiss yang merupakan bapaknya ilmu pariwisata yang terkenal, dimana batasan yang diberikannya berbunyi sebagai berikut: Kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendalaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendalaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu.

Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis pariwisata menurut Yoeti (2001)

1. Wisata Agro ; ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan industri pertanian, misalnya wisata durian pada saat musim durian, atau wisata tani, yakni para wisatawan turun terjun aktif menanam padi dan memandikan kerbau di sungai.

2. Wisata Belanja ; dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain, misalnya Bandung dengan pusat Jins di Jl. Cihampelas, Sidoarjo dengan pusat Tas di Tanggulangin.
3. Wisata Budaya ; berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi misalnya mudik lebaran setahun sekali atau ada peristiwa budaya yang digelar pada saat-saat tertentu, misalnya : Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, Ngaben di Bali, Labuhan di Cilacap, pemakaman jenazah di Tana Toraja.
4. Wisata Iklim ; bagi negara beriklim empat, pada saat tertentu benar-benar dilakukan untuk melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk ‘berburu’ panas sinar matahari. Begitu juga untuk masyarakat tropis seperti Indonesia, penduduk kota pantai berwisata ke pegunungan dan sebaliknya.
5. Wisata Karya ; jenis pariwisata yang para wisatawanannya berkunjung dengan maksud Dinas atau tugas-tugas lain, misalnya : peninjauan/inspeksi daerah, sigi lapangan.
6. Wisata Kesehatan ; berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit.
7. Wisata Konvensi atau Seminar ; dilakukan dengan sengaja memilih salah satu daerah tujuan wisata (DTW) sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan.

8. Wisata Niaga ; berkaitan dengan kegiatan perniagaan(usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan perniagaan di tempat tersebut, misalnya mata niaga atau tempat perundingan niaga ada disana.
9. Wisata Olahraga ; yakni mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, Pekan Olahraga Nasional, Asean Games, Olimpiade, atau sekedar pertandingan persahabatan.
10. Wisata Pelancongan/Pesiar/Pelesir/Rekreasi ; dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketegangan (lepas dari kesibukan kerja rutin).
11. Wisata Petualangan ; dilakukan lebih ke arah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan.
12. Wisata Ziarah ; dalam kaitan dengan agama dan budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu, misalnya : waisak di kompleks candi borobudur – Magelang, menyepi di pantai parangkusumo – Yogyakarta, mengunjungi tempat yang dianggap keramat, ziarah ke makam tokoh-tokoh masyarakat atau pahlawan bangsa.
13. Darmawisata ; perjalanan beramai-ramai untuk bersenang-senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan, atau eksekursi;

atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.

14. Widiawisata (pendidikan) ; perjalanan ke luar (daerah, kampung) dalam rangka kunjungan studi; dilakukan untuk mempelajari seni budaya rakyat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya atau untuk kepentingan ilmu selama waktu tertentu, misalnya tugas belajar.

3. **Pengelolaan Pariwisata**

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai social yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal . Menurut Cox (1985) dalam Pitana (2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan meningkatkan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di samping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antar berbagai elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Prinsip-prinsip keseimbangan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan *versus* konversi

Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun mengelolanya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi menjadi factor yang esensial bagi keberlanjutan pariwisata.

2. Penawaran *versus* permintaan

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Penawaran mewakili produk pariwisata seperti taman wisata alam, akomodasi dengan gaya lokal, eko-tur, sarana rekreasi, aktivitas budaya, dan sebagainya. Sedangkan permintaan mengacu kepada pasar pariwisata, yaitu wisatawan

tipe apa yang akan disasar, berapa jumlah yang akan berwisata, di mana mereka akan menginap, berapa uang yang akan mereka keluarkan, kegiatan menarik apa yang akan mereka lakukan, dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran dan permintaan merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata. Penekanan salah satu atas lainnya akan membawa masalah di masa yang akan datang.

3. Keuntungan *versus* biaya

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan memastikan bahwa ada keseimbangan distribusi keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*). Hal ini menyangkut pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian *fee* untuk mengatasi dampak aktifitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya sosial, ekonomi dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata yang mampu membiayai diri sendiri (*economically self-sufficient*) perlu disusun kebijakan financial dan fiscal yang wajar, disamping juga harus memperhatikan factor non ekonomi seperti, biaya dan keuntungan sosial dan lingkungan. Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi salah satu penentu keberlanjutan pariwisata.

4. Manusia *versus* lingkungan

Tantangan pengelolaan pariwisata dalam mencari keseimbangan antara *traditional ways* dengan *modern practices*. Di beberapa kawasan wisata, penduduk lokal kadang belum atau bahkan tidak menerapkan metode

konservasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal itu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang melimpah di masa lalu. Cepat atau lambat kondisi itu tidak akan dapat bertahan mengingat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang secara alami akan memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan penghidupannya. Keberagaman peristiwa dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang, dan sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini bisa berjalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. Melalui proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan perubahan perilaku dan kebiasaan komunitas lokal yang merugikan lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghancuran terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan sumber daya yang melebihi kapasitas normal, serta praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya. Sebaliknya penekanan dan penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukung kelestarian lingkungan perlu diakui.

C. Konsep Masyarakat

Soekanto (1982), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan

sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Taneko (1984), mengemukakan beberapa ciri-ciri suatu masyarakat

a. Manusia Hidup Bermasyarakat

Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicerminkan dan mencerminkan masyarakatnya. Kegigihan individu Jepang dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara keseluruhan.

b. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat

Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkah laku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya.

c. Memahami budaya dan masyarakat lain

Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud. Seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut.

d. Memupuk kerjasama di antara masyarakat

Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia

keseluruhannya. Bagi mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat.

Adapun Unsur-Unsur Suatu Masyarakat yaiutu:

a. Manusia Yang Hidup Berkelompok

Manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantung. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain. Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dnegan proses penyesuaian.

b. Mengalami perubahan

Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.

c. Berinteraksi

Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuan

berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.

d. Terdapat Kepimpinan

Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya.Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan.

e. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat.

Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas, status dan kasta.Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan.

Sejalan dengan pemahaman masyarakat diatas maka menurut teori sibernetik tentang *General System Of Action*, Ankie M.M (1985) menjelaskan bahwa suatu masyarakat akan dapat dianalisis dari sudut syarat-syarat fungsionalnya yaitu:

a. Fungsi mempertahankan pola (*Pettern Maintenance*)

Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan

prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat, oleh karena diorientasikan realitas yang terakhir.

b. Fungsi integrasi

Yang mana mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusinya pada organisasi dan peranannya dalam keseluruhan sistem.

c. Fungsi pencapaian tujuan (Goal Attainment)

Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, mobilisasi warga masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

d. Fungsi adaptasi

Yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisik organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya.

Linton (1968) Kelompok masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan social, yang didalamnya terdapat tiga kriteria kelompok, yaitu:

1. ada atau tidaknya organisasi
2. ada atau tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok

3. ada atau tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada dalam kelompok dimaksud.

Berdasarkan analisis menggunakan tiga kriteria tersebut dalam masyarakat dikenal beberapa jenis atau macam kelompok, yaitu:

1. Asosiasi. Asosiasi merupakan kelompok yang memenuhi tiga kriteria Bierstedt tersebut. Suatu asosiasi atau organisasi formal terdiri atas orang-orang yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis, ada hubungan sosial di antara warga kelompok dan organisasi.
2. Kelompok Social. Kelompok yang para anggotanya memiliki kesadaran akan kesamaan jenis serta hubungan sosial di antara warganya, tetapi tidak mengenal organisasi, oleh Bierstedt disebut sebagai kelompok social
3. Kelompok Kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran jenis saja, tidak ada hubungan sosial di antara orang-orang tersebut maupun organisasi disebut sebagai kelompok kemasyarakatan (societal groups). Misalnya kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Orang sadar sebagai sesama laki-laki atau sesama perempuan, namun tidak ada organisasi ataupun komunikasi di antara mereka.
4. Kelompok Statistik. Bentuk terakhir dari kelompok adalah kategori atau kelompok statistic, yaitu kelompok yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kesamaan jenis (misalnya jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan sebagainya), tetapi tidak memiliki satu pun dari tiga kriteria kelompok menurut Bierstedt.

Sebenarnya kelompok statistik bukanlah “kelompok”, sebab tidak memiliki tiga ciri tersebut. Kelompok statistik hanyalah orang-orang yang memiliki kategori statistik sama, misalnya kelompok umur (0-5 tahun, 6-10 tahun), yang dipakai dalam data penduduk Biro Pusat Statistik. Dalam kelompok ini sama sekali tidak ada organisasi, tidak ada hubungan antar-anggota, dan tidak ada kesadaran jenis

D. Konsep Pemerintahan Daerah

Definisi pemerintahan daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 mengacu pada suatu organisasi pemerintahan berbasis wilayah dan penduduk tertentu yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan yang telah diserahkan kepadanya oleh pemerintahan di atasnya. Dan yang terbaru merujuk pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2008. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 7, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini juga berarti bahwa daerah akan menjadi lebih eksis jika mampu benar benar mengelola dan *me-manage* sumberdaya yang dimiliki.

1. Peran Pemerintah Daerah

Melaksanakan tugas pembangunan sangat penting dan merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya pemerintah semata-mata. Akan tetapi, meskipun demikian harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Adapun peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan, yaitu antara lain (Siagian, 2007) :

1. Selaku Stabilisator

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai stabilisator dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu antara lain bidang politik, ekonomi, dan bidang sosial budaya. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara berbagai kekuatan politik, apalagi yang didasarkan pada perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan dari luar

biasanya datang dari negara-negara kuat dan adikuasa yang ingin memantapkan pengaruhnya dan bahkan memperluas hegemoninya. Artinya ingin agar lingkungan pengaruh makin melebar yang antara lain berupa panutan ideologi dan sistem politik yang berlaku di Negara kuat tersebut yang diinginkan agar di terapkan di lingkungan makin banyak negara yang akan diakui sebagai sekutunya. Kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan tidak akan dapat berlangsung dengan mantap tanpa adanya stabilitas politik.

Dalam bidang ekonomi pemerintah diharapkan untuk dapat menjamin kondisi stabilitas ekonomi yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, dan kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kehidupan nasional.

Bidang sosial budaya, pemerintah diharapkan dapat menjadi Negara dan bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Harus diakui bahwa pembangunan sosial budaya seolah-olah mengandung dilema karena di satu pihak ada unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan, akan tetapi di lain pihak bangsa yang bersangkutan harus siap menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Mempertahankan jati diri memang

sangat penting karena dalam jati diri itulah kekhasan suatu bangsa diketahui, dikenali dan diakui oleh pihak atau bangsa lain. Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan berbagai cara, yaitu antara lain kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

2. Selaku inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yang baru.

3. Selaku modernisator

Melalui pembangunan setiap negara menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sistem pendidikan nasional yang handal, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan. Untuk

mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern seperti itu. Proses modernisasi harus terjadi di lingkungan biokrasi pemerintah sendiri.

4. Selaku pelopor

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain bahwa selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kepeloporan yang dapat diberikan pemerintah misalnya kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundangundangan dan sebagainya.

5. Selaku pelaksana sendiri

Meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bias diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Sebagaimana peran pemerintah tersebut sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri,

pembangunan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal atau sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terjadi keseimbangan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik.

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah.

Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah :

- a) Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c) Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat,
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya,
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah, serta

4. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

E. Kerangka Fikir

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Seruni sangat ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut pengembangan pariwisata yang mencakup kebijakan pokok, yang menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Selain itu, menyediakan dan mengembangkan berbagai amenities (sarana penunjang) pariwisata, pengembangan SDM, pengembangan produk wisata, pengembangan pasar dan pemasaran, memberikan bantuan dana kepada kelompok usaha seni pada objek wisata juga harus di perhatikan oleh pemerintah dalam pengelolaan objek wisata.

Namun dalam melaksanakan beberapa peran pemerintah, tidak berjalan semudah yang dibayangkan, akan selalu ada faktor penghambat dan pendukung yang menyertai pelaksanaannya. Dan ketika faktor pendukung lebih banyak daripada faktor penghambatnya maka pelaksanaan pengelolaan akan lebih cepat, dan begitupun sebaliknya. Ketika pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang ada di objek wisata Pantai Marina. Dan akhirnya akan berimbas kepada pendapatan daerah dan itu menandakan keberhasilan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata, khususnya Objek Wisata Pantai Seruni.

BAGAN KERANGKA FIKIR



F. Fokus Penelitian

1. Pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng).
2. Kemitraan Pemerintah Dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng.
3. Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng
4. Kelompok Masyarakat (Laskar Kebersihan).
5. Factor Pendukung Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni.
6. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, maka diuraikan beberapa deskripsi focus sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng
2. Kemitraan pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan objek pariwisata pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng
3. Kelompok masyarakat dalam hal ini ialah Laskar Kebersihan
4. Kemitraan Partnership. Dalam hubungan kemitraan ini pemerintah yakni semua jajaran atau SKPD yang terkait dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Seruni ini berperan atau bekerja sama dalam menyusun kebijakan, memberikan penyuluhan atau pengarahan, kemampuan dan keterampilan yang memihak kepada kepentingan Kelompok Masyarakat (Laskar Kebersihan), serta melakukan transparansi dan akuntabilitas

publik..

5. Kemitraan *Linear Collaborative*. Dalam kemitraan ini, pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, dari SKPD yg terkait lainnya ataupun dari kekuatan para pihak lainnya, namun tekanan utamanya adalah kesamaan visi dan misi dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Seruni.
6. Kemitraan *mutualistik*. Dalam kemitraan ini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berperan serta dalam proses pengelolaan, dengan menyiapkan sarana untuk berjualan.
7. Faktor Pendukungnya dalam hal ini, letak geografis dan sumber daya manusia yang mendukung dan juga letak Pantai Seruni yang berada di tengah-tengah pesisir kota Kabupaten Bantaeng dan juga merupakan Ikon Kabupaten Bantaeng.
8. Faktor penghambat dalam hal ini:
 - a. Ketersediaan lahan yang masih kurang, yaitu pemerintah terbatas dalam pengembangan objek wisata ini, karena lahan yang dimiliki tidak bisa lagi menampung atau memuat, apabila pemerintah ingin menambah sarana dan prasarana yang ada.
 - b. Keterbatasan dana, dana yang diperlukan untuk mengelola objek wisata Pantai Seruni masih kurang kalau hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bantaeng.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dan kelompok masyarakat sekitar atau yang tergolong dalam Laskar Kebersihan). Topik yang diteliti sekitar tentang kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata pantai seruni, yang dinilai dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam upaya aktualisasi data dan informasi serta realisasi kebijakan dapat dilihat di beberapa kabupaten/kota terutama dapat terungkap di daerah yang dijadikan sampel dinilai representatif terhadap daerah lain di Kabupaten Bantaeng. Lokasi yang menjadi sampel yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dan objek Wisata Pantai Seruni yang berlokasi di kecamatan Tappanjeng Kabupaten Bantaeng, yang berlangsung dari bulan Februari sampai dengan April tahun 2014.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas penulis yang menyangkut studi kasus mengenai kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Bantaeng kiranya lebih menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selain, pemilihan dan penggunaan desain ini terkait dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan dengan menghimpun

kemudian menganalisis berbagai fakta dan data terkait sejauh mana SDM atau Masyarakat aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dalam mengelola objek wisata Pantai Marina.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode wawancara dan observasi lapangan dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pejabat struktural dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen misalnya foto dan data statistik. Sumber data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, bukti-bukti dapat dating dari enam sumber, yakni; dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, obsevasi pameran serta perangkat fisik. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari informan kunci berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa pejabat struktural dan staf Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantaeng seperti Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 55 tentang Kepariwisataaan, PP RI No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional, Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dihimpun untuk penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer, sedangkan data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap analisis data primer tersebut. “peneliti tidak terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan, merekrut dan melati pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan energi dan waktu”. Menggunakan teknik *aksidental* yaitu siapa yang ditemui saat penelitian, maka itu yang dijadikan sebagai sampel

1. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan narasumber yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang menyangkut kebijakan dan pelaksanaan kepariwisataan di

Kabupaten Bantaeng. Pertanyaan yang disampaikan penulis secara lisan dan terstruktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada pengungkapan masalah kepariwisataan serta kalsifikasi data sekunder.

2. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan para pegawai Dinas Pariwisata, serta pengelola wisata di Objek yang dijadikan sample.
3. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literature dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kepariwisataan. Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci dan ada korelasinya dengan permasalahan dihadapi oleh kepariwisataan di Kabupaten Bantaeng.

E. Informan

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan informan kunci diambil dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantaengserta aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah dengan rincian sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Bantaeng	1 Orang
3.	Kepala Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni	1 Orang
4.	Kepala Dinas Kebersihan	1 Orang
5	Lurah Pallantikang	3 Orang
6	Laskar Kebersihan	1 Orang
7	Tokoh Masyarakat	1. Orang
Jumlah		8 Orang

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Moleong (2000) mengatakan bahwa analisis data adalah proses yang mengorganisasikan, mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Pilihan alternatif kebijakan yang terbaik yang dapat mencapai tujuan dengan efektif dan realistis dapat dilaksanakan sangat tergantung pada hasil analisis pemilihan bebrapa alternatif kebijakan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing adalah meneliti kembali catatan setelah kembali dari lapangan. Data-data diperoleh, dikumpulkan, direduksi, dipilih, kemudian data yang relevan dirangkum dengan permasalahan peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga merefleksikan permasalahan yang ditentukan.

3. Tabulasi Data

Tabulasi data yaitu menggolongkan data ke dalam kelompok-kelompok sehingga penelitian menjadi lebih terarah.

4. Interpretasi

Interpretasi yaitu mencari data yang lebih luas dari data yang ada diolah bersamaan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan yang berkorelasi dengan hal dimaksud.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu di uji kekuatan atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi Waktu.

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data

H. Jadwal Penelitian

- a. Persiapan, yaitu tahap penelitian mengurus segala perizinan dan menyusun segala instrument penelitian,
- b. Pelaksanaan, yaitu pengumpulan data, mengelola data, menganalisis data dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan,
- c. Penyelesaian, yaitu peneliti melaksanakan penulisan laporan penelitian, diskusi perbaikan dan pengandaan laporan (proposal)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

a. Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng memiliki rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2013-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan hambatan yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta pencapaian tujuan, dan sasaran tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Rencana Stratejis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng tahun 2013-2018 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk lima tahun yang akan datang, dan harus mempunyai visi dan misi yang berorientasi pada masa yang akan datang. Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diarahkan untuk mendukung dan bersinergi dengan program Kabupaten Bantaeng.

Visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng diformulasikan tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantaeng adalah mewujudkan Butta Toa Bantaeng sebagai destinasi wisata yang berbasis kemandirian lokal.

Guna mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, perlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Perumusan misi adalah merupakan suatu hal sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Sebagai penentu arah tindakan operasional organisasi, perumusan misi perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.

Rumusan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kawasan dan obyek wisata daerah termasuk tempat- tempat bersejarah dan obyek wisata budaya.
2. Mengembangkan seni budaya daerah sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
3. Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan situs benda cagar budaya.

4. Meningkatkan image, daya tarik dan citra khas obyek wisata andalan.
5. Mensosialisasikan sadar wisata dan sapta pesona di kalangan pelajar dan masyarakat.
6. Melibatkan *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Mengembangkan usaha-usaha pariwisata dengan kerjasama mitra usaha dan investor.
8. Memberikan kemudahan bagi investor untuk bekerja sama mengembangkan obyek- obyek wisata.
9. Memberikan pembinaan dan pendidikan bagi lembaga/ organisasi seni, budaya dan sastra.

c. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Pada hakekatnya, tujuan merupakan penjabaran sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng selama lima tahun ke depan untuk memberikan arahan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Adapun tujuan yang telah dijabarkan dalam kurun waktu 2013-2018 adalah meliputi:

- a. Tersedianya standar operasional pelayanan

- b. Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada karakter budaya daerah dan perlindungan hukum individual dan komunal.
- c. Tercapainya apresiasi, partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian seni budaya daerah.
- d. Tersedianya teknik dan strategi pemasaran pariwisata
- e. Terciptanya produk khas Bantaeng
- f. Terwujudnya sistem dan data base kebudayaan dan pariwisata
- g. Tertariknya pihak swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan obyek wisata yang berpotensi nilai jual tinggi
- h. Meningkatnya kontribusi penerimaan pariwisata terhadap penerimaan daerah
- i. Terciptanya mutu produk wisata yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
- j. Terwujudnya desa dan kelurahan wisata andalan yang mandiri

Setelah merumuskan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama dalam penentuan sasaran tindakan dan alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi setiap dalam kurun waktu lima tahun.

Selaras dengan tujuan dan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam lima tahun yang akan datang, dirumuskan sasaran yang ingin dicapai meliputi :

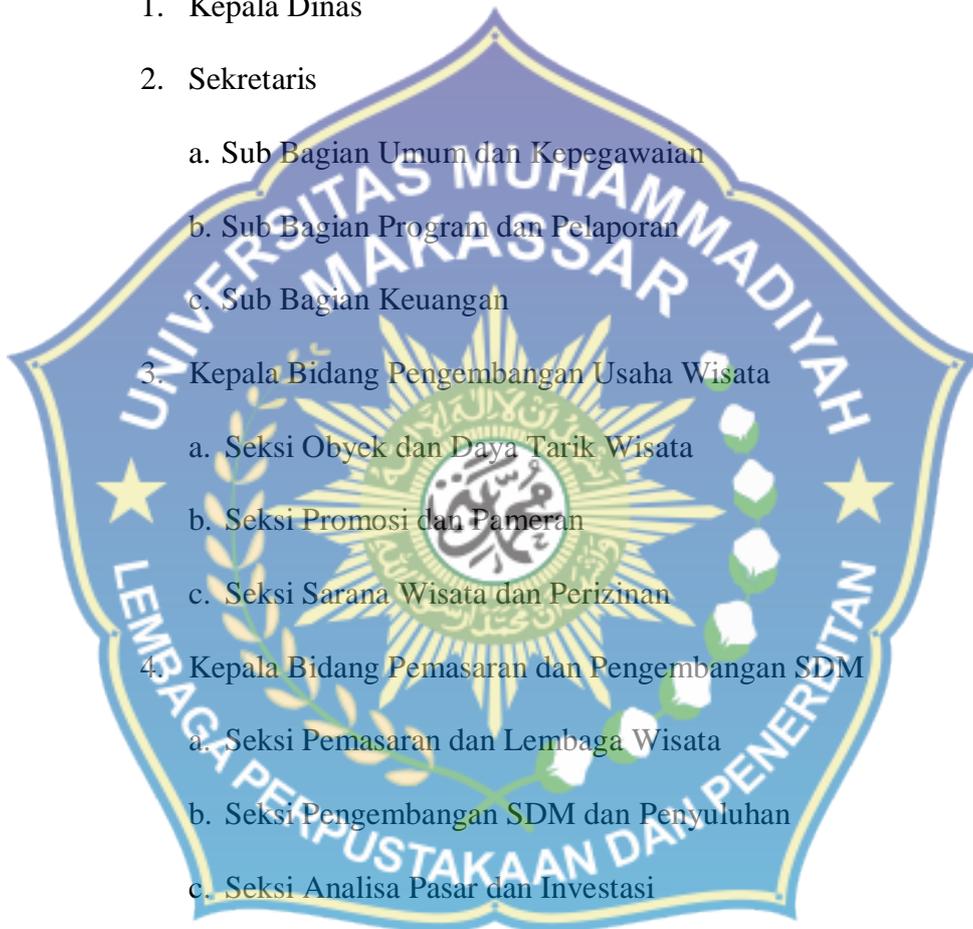
- a. Terselenggaranya *good governance*
- b. Terwujudnya sikap saling menghargai di antara berbagai komunitas seni budaya
- c. Terciptanya seni dan budaya daerah yang menjadi ciri khas bagi tiap desa dan kelurahan.
- d. Meningkatnya kontribusi dan partisipasi dalam berbagai even di dalam dan luar negeri
- e. *Branding* produk pariwisata unggulan
- f. Tercapainya peningkatan kualitas SDM aparatur dan pelaku pariwisata
- g. Tercapainya akses informasi dan teknologi bagi masyarakat
- h. Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan
- i. Terwujudnya pengembangan *agro, eco* dan *marine tourism*
- j. Terciptanya paket- paket wisata yang khas desa.

Untuk mengembangkan berbagai potensi wisata daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memacu SDM dan SDA yang menjadi andalan bagi peningkatan sumber pendapatan daerah khususnya di bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mempromosikan potensi obyek dan daya tarik wisata agar dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat domestik maupun mancanegara.

d. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 19 Tahun 2010, yang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Wisata
 - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - b. Seksi Promosi dan Pameran
 - c. Seksi Sarana Wisata dan Perizinan
4. Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan SDM
 - a. Seksi Pemasaran dan Lembaga Wisata
 - b. Seksi Pengembangan SDM dan Penyuluhan
 - c. Seksi Analisa Pasar dan Investasi
5. Kepala Bidang Seni dan Budaya
 - a. Seksi Pengembangan Seni Budaya
 - b. Seksi Kesenian Tradisional dan Modern
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya
6. Kepala Bidang sejarah dan Museum
 - a. Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan



- b. Seksi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
 - c. Seksi Pengelolaan Museum dan Monumen
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, dari tugas pokok tersebut Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Keadaan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng**

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pegawai dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi. Tidak menjadi soal tujuan organisasi apa yang akan dicapai. Dibentuknya satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan.

f. Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	22 orang	64%
2.	Perempuan	17 orang	36%
Jumlah		39 orang	100%

Tabel 1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Keadaan Juni 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dilihat dari jenis kelamin, sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng terdiri atas laki-laki: 22 orang (64%) dan perempuan: 17 orang (36 %). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan objek wisata Pantai Seruni jika dilihat dari selisih jumlah yang tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 28 %, mengindikasikan adanya keseimbangan antara laki- laki dan perempuan untuk berpartisipasi (*participation*) terutama dalam mengemukakan pendapat dan dalam pengambilan keputusan.

g. Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Keadaan sumber daya aparatur pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berdasarkan eselonisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan Pegawai berdasarkan Eselonisasi

No.	Esolon	Jumlah	Prosentase
1.	II	1 orang	1%
2.	III	5 orang	15%
3.	IV	15 orang	35%
4.	Non Eselon	18 orang	49%
Jumlah		39 orang	100%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Keadaan Juni 2012

Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berdasarkan eselonisasi terdiri atas eselon II: 1 orang (1 %), eselon III: 5 orang (15%), eselon IV : 15 orang, dan non eselon: 18 orang (49 %). Hal tersebut menunjukkan tingkatan pegawai yang telah memenuhi syarat untuk disertai tanggung jawab sekaligus wewenang berdasarkan jabatan/eselon yang dipegangnya, juga menandakan bahwa mereka yang memegang eselon dianggap memiliki rasa tanggung jawab/akuntabilitas yang tinggi dan bisa merespon setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan, sehingga mampu

mengimplementasikan perannya dalam pengelolaan objek wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng.

2. Profil Kelompok Masyarakat (Laskar Kebersihan)

Laskar kebersihan merupakan suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah naungan Bapedalda yang bergerak di bidang kebersihan kota Kabupaten Bantaeng khususnya di area wisata pantai seruni. Yang melatar belakangi terbentuknya Laskar Kebersihan ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa kebersihan itu merupakan suatu kebutuhan sehingga harus kita lakukan, karna bahkan di dalam agama Islam dikatakan bahawa kebersihan itu sebahagian dari iman begitu pula dengan agama lain, dan ketika kita ingin hidup sehat, maka kebersihan ini harus tetap kita jaga.

Laskar Kebersihan terbentuk pada tahun 2008, sejak Bapak Prof. Dr. Ir. M. Nurdin Abdullah M .Agr terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng, dan beliauulah yang mengusulkan dibentuknya Laskar Kebersihan ini dan mulai di rambukkan agar bagaimana caranya Kabupaten Bantaeng bisa Menjadi Kabupaten yang bersih. Karna ini adalah sebuah system maka akan berjalan secara terus menerus dan Kabupaten Bantaeng akan Memiliki kejayaan pada masa yang akan datang.

Pola jam kerja dari Laskar Kebersihan ini dibagi menjadi tiga *shift*

- a. *Shift* pagi, mulai dari pukul 05:00 sampai pukul 09:00
- b. *Shift* siang, mulai dari pukul 13:00 sampai pukul 17:00

c. *Shift* malam, mulai dari pukul 19:00 sampai pukul 23:00

Terbukti dengan adanya Laskar Kebersihan ini, sejak awal terbentuknya sampai sekarang, Kabupaten Bantaeng telah berhasil menunjukkan prestasinya dengan mendapatkan beberapa penghargaan Adipura di dalam bidang kebersihan, bahkan Kabupaten Bantaeng di jadikan sebagai contoh Kabupaten Kota yang berada di seluruh Indonesia.

Laskar Kebersihan ini berada di bawah naungan Bapedalta tetapi dalam persoalan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan, baik yang melakukan sebagai petugas kebersihan, Masyarakat yang ikut bekerja sama sebagai pedagang di sekitar Obyek Wisata Pantai Seruni tersebut maupun Masyarakat yang menikmati Obyek Wisata ini adalah sepenuhnya peranan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, sedangkan peran dari Bapedalda hanya berperan dari segi administratif keuangan, seperti Penggajian dan Jaminan Kerjanya.

3. Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng

Obyek dan daya tarik wisata bahari ini terletak di jalan seruni kelurahan pallantikang Kecamatan bantaeng Kabupaten Bantaeng, sekitar 6 km dari perbatasan jeneponto Bantaeng. Perjalanan menuju kesana dapat ditempuh sekitar 15 menit melewati jalan poros Bantaeng ke arah Kabupaten Bulukumba. Pantai Seruni ini letaknya tidak jauh dari jalan raya, dimana “Pantai Seruni ini yang dulunya bernama Pantai “selatan” memiliki nilai- nilai keunggulan dan keunikan secara fisik dan visual yang berupa sifat, karakter, budaya, bentuk dan lain sebagainya yang secara

substansial mampu membawa dan menjadikan ruang rencana memiliki jati diri yang lebih unggul, unik, khas, moderen dan berbeda dari area- area lainnya. Adapun bentuk keunikan dan keunggulan baik yang bersifat alamiah dan buatan yang dimiliki oleh Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng adalah :

1. Memiliki panorama pantai dan *sunset* yang indah
2. Memiliki lapangan multifungsi, sentral sport seperti lapangan futsal, takraw, volly pantai dan olahraga pantai seperti jet ski dan banana boat. Pantai Seruni ini juga letaknya berhadapan langsung dengan rumah sakit Internasional Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, dan tidak usah takut untuk kelaparan karna di Pantai Seruni ini ada banyak di sediakan warung makan yang berjejeran di pinggir pantai dan cafe-cafe untuk sekedar ngopi sambil menikmati pisang epe sekalin melihat sanset disoreh hari. Tak usah khawatir untuk para anak-anak kecil karna di tempat ini juga telah disediakan permainan anak seperti kereta malam, sepeda santai, scuater, mobil remot dll.
3. Aksesibilitas untuk mencapai lokasi obyek wisata ini cukup baik karena terletak tidak jauh dari jalan raya, juga tersedia jalan setapak untuk mencapai lokasi obyek wisata dari jalan raya.
4. Pantai Seruni ini memiliki 4 buah gasebo dan tribun sebagai tempat penjamuan para tamu bupati dari luar kota atau kabupaten lain yang berkunjung ke kabupaten Bantaeng, yang ditempatkan sedemikian rupa

sebagai fasilitas yang disiapkan bagi pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati panorama pantai, *sunrise* maupun *sunset*-nya.

Berkaitan dengan pengelolaannya, Pantai Seruni memiliki beberapa orang petugas yang terdiri dari tenaga honorer Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng maupun dari masyarakat di sekitar Pantai Seruni sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal, petugas pengamanan (SATPOL PP), petugas *life guard*, petugas kebersihan dan petugas pemberi informasi pariwisata, karena di Pantai Seruni juga terdapat Pusat Informasi Pariwisata (*Tourism Information Centre*).

Adapun rincian untuk petugas- petugas yang ditempatkan di Pantai Seruni tersebut adalah:

1. Petugas SATPOL PP 8 orang yang bertugas secara bergantian
2. Petugas *life guard* 1 orang (masyarakat setempat)
3. Lascar kebersihan 12 orang yang bertugas secara bergantian (pagi, siang, dan malam)
5. Petugas informasi 2 orang

B. Kemitraan Pemerintah Dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng

1. Kemitraan *Partnership*

Dalam hubungan kemitraan ini pemerintah yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta semua instansi pemerintah yang terkait dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Seruni dan kelompok masyarakat ini

berperan atau bekerja sama dalam menyusun kebijakan, memberikan penyuluhan atau pengarahan, kemampuan dan keterampilan yang memihak kepada kepentingan Kelompok Masyarakat (Laskar Kebersihan).

1.1. Mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Yang Mencakup Kebijakan Pokok Pengelolaan Pariwisata

Objek wisata yang ingin dijadikan sebagai objek wisata unggulan, dalam pengelolaannya harus ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai pengelola agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai yang diinginkan, dan mencapai target. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata.

“...kemampuan dan keterampilan aparatur harus ditingkatkan agar dalam tugasnya dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan tugas yang mereka emban masing-masing” (wawancara dengan HZ, tanggal 13 Mei 2014)

Melihat hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur dan pemberdayaan tugas dan fungsinya sangat bagus untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka pengelolaan objek wisata Pantai Seruni.

- 1.2. Pola kerja sama antara pihak Pariwisata, Bapedalda, dan Instansi lain yang terkait dalam pengelolaan kebersihan pantai seruni.

Objek wisata yang baik dan unggulan, dalam pengelolaannya harus ada kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini dinas Pariwisata, Bapedalda, dan instansi terkait dalam pengelolaan kebersihan dan keasrian di Pantai Seruni agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berikut:

“... jadi pemerintah kabupaten bantaeng di dalam melakukan kerja sama itu senantiasa memiliki komitmen untuk selalu bersinergi baik antara Dinas Pariwisata, Bapedalda maupun dinas-dinas yang lainnya, jadi pemerintah kabupaten Bantaeng itu adalah satu *time work* atau satu kesatuan sehingga di dalam menyelenggarakan kegiatan kebersihan, pariwisata dan lainnya. Artinya jika kami memiliki suatu permasalahan semua komponen, kepala SKPD atau dinas tertentu pasti turun tangan, jadi sinergitas yang di turunkan oleh Prof. Nurdin ini kepada setiap SKPD, senantiasa melahirkan sebuah *time work* yang kuat dan itu adalah sistem...” (wawancara dengan HZ, tanggal 13 Mei 2014).

Senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, yang mengatakan bahwa:

“... jadi dari segi administratif keuangan di lakukan langsung oleh pihak Bapedalda, jadi penggajiannya, jaminan kerjanya, itu Bapedalda yang menangani. Tapi persoalan- persoalan pembinaannya, baik yang melakukan sebagai petugas kebersihan maupun masyarakat yang menikmati obyek wisata itu adalah perannya pariwisata...” (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2014).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini dinas-dinas, instansi dan kepala SKPD senantiasa bersinergitas atau bekerja sama untuk membentuk suatu *time*

work yang kuat dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti halnya dalam pembangunan objek wisata Pantai seruni ini, dan disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan kerja sama terhadap SKPD terkait agar lebih cepatnya pembangunan yang dilakukan. Serta harus ada kerjasama yang baik antara SKPD terkait tersebut.

Dinas Kebersihan yang merupakan bagian atau Dinas yang berada di bawah naungan Bapedalda, atau yang di maksud dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dalam penelitian ini negeaskan bahwa, Dinas Kebersihan dalam hal ini memegang peranan hanya sebagai administratif keuangan yang penugasan khususnya hanya malaksanakan penggajian dan jaminan kerja kepada para Laskar Kebersihan. Hal ini di tegaskan dari kutipan wawancara oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata yang mengatakan bahwa dari segi administratif keuangan di lakukan langsung oleh pihak Bapedalda, jadi penggajiannya, jaminan kerjanya, itu Bapedalda yang menangani. Tapi persoalan- persoalan pembinaannya, baik yang melakukan sebagai petugas kebersihan maupun masyarakat yang menikmati obyek wisata itu adalah Dinas Pariwisata.

Kepala Dinas Kebersihan kembali menegaskan melalui dari hasil wawancara yang di kutip dari Block resmi Bapedalda yang mengatakan bahwa

“...Jaemuddin kepala bidang kebersihan dan pertamanan mengatakan, bahwa gaji para petugas kebersihan berubah-ubah karena persoalan anggaran terbatas untuk biaya gaji dari para petugas kebersihan. Naik turunnya gaji petugas kebersihan di

dinas Lingkungan hidup itu terkait anggaran yang dialokasikan di dinas juga sangat terbatas, Ditambahkan, persoalan naiknya gaji petugas kebersihan kabupaten Bantaeng akan selalu mendapat perhatian dari Pemerintah melalui Dinas kebersihan. Hanya saja di tahun ini anggaran sementara mengalami defisit anggaran, namun jika pagu anggaran naik, maka gaji petugas kebersihan juga akan disesuaikan dan dinaikkan dalam perbulan...” (wawancara dengan JM).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa Dinas Kebersihan yang berada di bawah naungan Bapedalda ini berperan sebagai Administratif keuangan bagi para Laskar Kebersihan.

1.3. Laskar Kebersihan

a. Pola jam kerjanya dapat kita ketahui dari hasil wawancara petugas

laskar kebersihan berikut:

“... jadi jam kerjanya disini terbagi tiga, ada yang masuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi mulai dari jam 5 atau habis sholat subuh sampai jam 9, kalau yang masuk siang mulai dari jam 1 sampai jam 5, terus yang masuk malam itu mulai dari jam 7 sampai jam 11, nanti bersihpi semua baru pulangki kerumah masing- masing...” (wawancara dengan MN 15 mei 2014).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa jam kerja dari para laskar kebersihan terbagi atas tiga, ada yang berjaga di saat pagi sampai siang, siang sampai sore dan sore sampai malam.

b. Honor atau gaji para laskar kebersihan berikut dari hasil

wawancara dengan petugas laskar kebersihan itu sendiri

“...jadi gaji kami itu tergantung dari lamanya kami bekerja, kalau orang lama bisa sampai di atas satu juta tapi kalo orang baru masih Rp 800.000. Trus ada juga bonus pertahun tergantung dari kebijakan pemerintah apa lagi kalau berhasilki dapat adipura bisaki dapat tip langsung dari bapak Bupati bisa sampai 5 juta per orang bahkan ada yang dikasi naik umroh ke Mekah kalo baguski

cara kerjata atau berprestasiki di kawasannya juga membersihkan...” (wawancara dengan RL 15 Mei 2014).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak segan-segan untuk memberikan upah kepada para laskar kebersihan, bahkan mampu memberikan tip kepada mereka yang mampu berprestasi.

c. Hambatan sekaligus harapan kedepannya dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan petugas laskar kebersihan berikut

“... jadi selama jadiki petugas kebersihan disini belum pernah pakii juga dapat hambatan karna lancar semuanya baik gajinya, jam kerjanya apa lagi kan masyarakat kan mulai juga sadar tentang kebersihan toh jadi kita juga sebagai petugas kebersihan tidak terlalu capek maki membersihkan...” (wawancara dengan RW 15 Mei 2014)

“... terus kalau masalah kedepan mudah-mudahan gajinya dinaikkan terus banyak bonus-bonus sama ada juga tunjangannya, sama masyarakatka juga semakin sadarki akan pentingnya kebersihan ituji harapan kami...” (wawancara dengan RW 15 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa selama para petugas laskar kebersihan menjalankan profesinya, mereka belum pernah menemukan hambatan, ditambah dengan masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya sebuah kebersihan. Terus dalam harapan kedepannya para laskar kebersihan menginginkan kenaikan gaji, bonus dan kesadaran masyarakat akan pentingnnya menjaga kebersihan lebih tinggi lagi demi kepentingan dan kenyamanan bersama.

2. Kemitraan *Linear Collaborative*

Dalam kemitraan ini, tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak, namun tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling ter subordinasi. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti berikut ini:

2.1. Program baru Pemerintah menyangkut para Laskar Kebersihan dalam

menjaga kebersihan di Pantai Seruni.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berikut:

“... upaya- upaya yang kita luncurkan adalah senantiasa memberikan hadiah kepada laskar kebersihan yang memiliki prestasi lebih dari para laskar yang lainnya, bahkan bapak Bupati senantiasa memberikan hadiah seperti umroh bagi para laskar kebersihan yang memiliki prestasi lebih, upaya lainnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya nilai kebersihan sehingga Insyaallah kedepan masyarakat akan semakin sadar untuk mencintai kotanya dan menjadikannya semakin bersih dan secara tidak langsung pemerintah telah memberdayakan masyarakat...” (wawancara dengan H Z, tanggal 13 Mei 2014).

Masih Senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, yang mengatakan bahwa:

“...disinilah peran dari dinas pariwisata, tetap melakukan pembinaan dan sosialisasi menyangkut tentang arti pentingnya menjaga kebersihan, agar kebersihan itu tumbuh dan berkembang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dari segi kesadarannya...” (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2014).

Dari hasil wawancara yang dilakukan menegaskan bahwa Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng telah melakukan banyak upaya sosialisasi bahkan memberikan pembinaan, pemberdayaan,

ataupun penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Dan secara tidak langsung masyarakat telah membantu para laskar kebersihan dalam menjaga keindahan, keasrian dan pastinya kebersihan dari Pantai Seruni itu sendiri.

2.2 Pihak kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayah lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kelurahan di pimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah di angkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil (Wikipedia, 2014).

a. Peran yang dijalankan dari pihak kelurahan menyangkut dalam pengelolaan objek pariwisata Pantai Seruni dapat di diketahui dari hasil wawancara Kepala Dinas kelurahan Pallantikang berikut:

“... jadi pemerintah kelurahan dalam hal ini men-support apa-apa yang sudah ditetapkan atau yang direncanakan oleh kepala-kepala atau kantor-kantor dinas yang berkompetensi atau berkaitan dengan Pantai Seruni itu...” (wawancara dengan KY 15 Mei 204)
 Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa pihak kelurahan

senantiasa mendukung apa-apa saja yang telah menjadi agenda atau yang

telah direncanakan oleh kepala-kepala dinas yang berkompetensi atau berkaitan dalam pengembangan atau pembangunan Pantai Seruni.

- b. Kerjasama tertentu dari pihak kelurahan dengan para pengelola Pantai Seruni dan para laskar kebersihan dapat diketahui dari hasil wawancara kepala kelurahan Pallantikaang berikut:

“... jadi sehubungan dengan yang tadi, pemerintah kelurahan sebagai penanggung jawab umum, jadi dalam hal kerja sama ini apa yang sudah dicanangkan atau ditetapkan sebagai program kerja oleh Bapedalda maupun Dinas Pariwisata itu kita support dan membantu memelihara, melihat, mengamankan, dan melaporkan kepada dinas yang bersangkutan...” (wawancara dengan KY 15 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa dalam hal kerjasama ini pihak Kelurahan sebagai penanggung jawab umum senantiasa mendukung, membantu memelihara, melihat, mengamankan dan melaporkan kepada Dinas yang bersangkutan.

- c. Harapan pihak kelurahan kedepannya terhadap Pantai Seruni dan pengelolaan kebersihannya dapat diketahui dari hasil wawancara Kepala Kelurahan Pallantikang sebagai berikut:

“... jadi harapan kami dalam hal ini ingin memanfaatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan segenap ruang lingkup pariwisata mulai dari pedagang kecil sampai pedagang-pedagang menengah yang bisa memanfaatkan potensi ekonomi di Pantai Seruni itu melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LPM

“...Kemudian PNPM. Inilah sementara dalam peninjauan dan perencanaan untuk mensinergikan bagaimana masyarakat bisa juga menikmati potensi ekonomi yang ada di Pantai Seruni ini...”(wawancara dengan KY15 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa untuk harapan kedepannya pihak kelurahan ingin mensinergikan melalui organisasi

kemasyarakatan dengan segenap ruang lingkup pariwisata mulai dari pedagang kecil sampai menengah bisa memanfaatkan potensi ekonomi di Pantai Seruni ini.

3. **Kemitraan *mutualistik*.**

Dalam Kemitraan ini, persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni Pemerintah melibatkan Masyarakat umum untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Seperti berikut ini :

- a. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata dan pelestarian budaya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini ialah membenahi segala sesuatu yang ada di objek wisata seperti penambahan tempat-tempat sampah, WC umum, papan informasi bagi wisatawan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat yaitu dengan memberikan secara cuma-cuma kanopi dan membangun *cafe-cafe* ataupun warung makan di dalam objek wisata Pantai Seruni tersebut. Seperti yang dikutip dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi berikut:

“...di daerah pantai seruni sana pada umumnya melibatkan berbagai elemen masyarakat kecil di dalam melakukan aktifitas jual jualan dalam hal ini adalah kuliner, sehingga dengan demikian, bahwa pengembangan dan pembinaan objek wisata di Pantai Seruni itu lebih

kita arahkan kepada pembinaan wisata-wisata *kuliner*. (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2014)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan jalan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengelolaan masyarakat, dengan menyiapkan sarana untuk berdagang dengan membangun *cafe-cafe* ataupun warung makan di dalam objek wisata Pantai Seruni ini.

3.1. Tokoh Masyarakat

- a. Pendapat para tokoh masyarakat mengenai keberadaan para laskar kebersihan. Wawancara berikut dengan salah seorang tokoh masyarakat di sekitar Pantai Seruni.

“...yaa bagi kami luar biasa karna memberi sebuah pelajaran bagi masyarakat yang biasanya membuang sampah sembarangan dan dengan adanya laskar kebersihan ini terkait dengan Dinas Kebersihan atau Bapedalda itu memberikan sebuah pemahaman dan pola fikir yang bagus dan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat lagi...” (wawancara dengan BR 15 Mei 2014).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa dengan adanya para laskar kebersihan ini mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat.

- b. Harapan seorang tokoh masyarakat kedepannya mengenai pengelolaan kebersihan di Pantai Seruni ini

“... jadi apa yang sudah ada pada hari ini terus dikembangkan dan diperindah lagi tempat sampahnya supaya gairah masyarakat untuk membuang sampah di tempat sampah itu memiliki daya tarik tersendiri, terus yang kedua tetap dipertahankan kalau perlu di tingkatkan kembali dengan cara menambah personil di setiap titik yang ada di kawasan-kawasan yang sifatnya seperti di tempat wisata pantai seruni ini...” (wawancara dengan BR 15 Mei 2014).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa harapan kedepannya dari pihak pemerintah khususnya Bapaedalda ataupun dari pihak Pariwisata mampu mempertahankan bahkan dikembangkan lagi agar masyarakat lebih tertarik untuk membuang sampah pada tempatnya.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni

1. Faktor Pendukung

1.1. Letak Geografis

a. Akses Jalan yang Mudah Dijangkau

Letak objek wisata Pantai Seruni yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah dijangkau baik oleh pengunjung maupun pengelola yang bertugas untuk mengelola objek wisata tersebut juga tersedia jalan setapak untuk mencapai lokasi objek wisata dari jalan raya. Hal ini ditegaskan oleh kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, beliau mengatakan bahwa:

“...kenapa Pantai Seruni sekarang kita anggap sebagai unggulan, karena di sana dekat di jalan negara, kemudian mudah dijangkau, mudah dilihat. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di sulawesi-selatan ini, yang paling dekat dari jalan raya kan, yang komplit semacam itu. Ada di pangkep, dekat memang dari jalan raya, tapi bukan jalan negara. Sedangkan Pantai Marina dekat dengan jalan negara. Ini bukan jalan provinsi dan bukan jalan nasional, tetapi jalan negara.” (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2014).

Dari penjelasan diatas makin menegaskan bahwa Pantai Seruni diunggulkan karena memang dekat dengan jalan raya,

sehingga akses untuk menuju ke tempat wisata tersebut sangat mudah dan itu juga berpengaruh besar terhadap pengelolaannya.

1.2. Sumber Daya Manusia Yang Mendukung

a. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat setempat sadar bahwa objek wisata Pantai Seruni sebagai salah satu tujuan wisata yang terkenal sehingga mereka turut serta mengambil bagian seperti menjaga kebersihan di objek wisata Pantai Seruni. Selain masyarakat disekitar objek wisata, pengelola objek wisata Pantai Seruni juga berusaha menjaga kelestarian objek wisata, seperti yang dikatakan pengelola objek wisata Pantai Seruni dalam wawancara sebagai berikut :

“...diobjek wisata Pantai Seruni ini, kami sudah berupaya melengkapi sarana kebersihan. Kami juga mengadakan kerja bakti di dalam objek wisata ini...”(wawancara dengan Nasir pada tgl 17 Mei 2014).

Hasil wawancara diatas menegaskan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata sangat sadar akan pentingnya kebersihan objek wisata agar mampu menarik banyak wisatawan.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng bahwa pengelolaan pariwisata Kabupaten Bantaeng tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pengelola objek wisata itu sendiri karena untuk mencapai peningkatan kualitas kepariwisataan ini dibutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif antara pemerintah,

masyarakat dan pengelola objek wisata seperti yang dikutip dalam wawancara berikut :

“...kami sangat bangga dengan masyarakat karena mereka mendukung sepenuhnya keberadaan objek wisata Pantai Seruni dan mampu menjaga kebersihan dan kelestarian di kawasan objek wisata tersebut dan juga pengelola objek wisata. Karena mereka dengan kesadaran sendiri mau membantu untuk menjaga kebersihan di sekitar objek wisata tanpa ada perintah langsung dari pihak tertentu” (wawancara dengan HZ, tanggal 13 Mei 2014)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi masyarakat yang ada disekitar objek wisata Pantai Seruni akan kesadarannya membantu pemerintah dalam mengelola objek wisata Pantai Seruni dengan selalu menjaga kebersihan objek wisata Pantai Seruni agar selalu indah.

Jadi, partisipasi aktif dari masyarakat, pengelola objek wisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bantaeng, memang sudah seharusnya dilakukan mengingat objek wisata Pantai Seruni yang ada di Kabupaten Bantaeng berada dekat dengan jalan raya dan tempatnya yang strategis maka hal yang paling kecil yang bisa membantu pemerintah adalah dengan menjaga kebersihan di objek wisata Pantai Seruni tersebut agar wisatawan juga betah saat berwisata.

- b. Adanya Komunikasi dan Kordinasi dengan SKPD Terkait

Adanya komunikasi dan kordinasi dengan SKPD terkait sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Seruni. Karena mengingat objek wisata Pantai Seruni merupakan objek wisata yang besar dan merupakan ikon dari kabupaten Bantaeng dan berskala internasional, maka memang harus dikerjakan oleh SKPD terkait. Karena apabila hanya dikerjakan dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan objek wisata ini cukup lama. Jadi, harus dikerjakan bersama SKPD terkait dalam hal pengadaan sarana dan prasarana objek wisata Pantai Seruni.

Mengutip dari wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, Bapak H.Hartawan Zaenuddin SH. MH, beliau menjelaskan tentang keterkaitan SKPD terkait dalam pengembangan objek wisata Pantai Seruni sebagai berikut:

“... dan yakinmaki bahwa pengembangan objek wisata Pantai Seruni itu multi SKPD, keroyokan. PU masuk, infrastruktur pariwisata dengan kesiapan kawasan, masuk Bapedalda dengan penataan kelistrikan dan taman-taman, masuk koperasi dengan pembinaan UKM, masuk penanggulangan bencana dengan menanggulangi kerusakan-kerusakan akibat abrasi. Masuk organisasi wanita PKK untuk membimbing kita punya kader-kader di sana, masuk Perindag untuk membikin kawasan tempat makan dan minum itu di depan, untuk persinggahan. Masuk Dinas Sosial lagi sekarang untuk membangun BLK Internasional. Jadi komplit dan saya pikir efektif, karena kita terbangun dalam *team work*, tim kerja. Kita bangun sistem. Jadi pelaksanaan kegiatan kita kedepan bisa mencapai target yang diinginkan.” (wawancara dengan HZ, tanggal 13 mei 2014)

Melihat wawancara diatas, sangat jelas bahwa dalam pengembangan objek wisata Pantai Seruni memang banyak SKPD yang ikut serta. Dan diyakini efektif karena terbangunnya sinergi antara SKPD terkait sehingga pembangunan yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2015 ini dapat direalisasikan.

Sehubungan dengan wawancara diatas, Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng Bapak Ir. Anwar Hamido, M.Si menegaskan bahwa :

“... pengelolaan objek wisata Pantai Seruni dikerjakan sepenuhnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. SKPD terkait hanya berpartisipasi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh objek wisata ini” (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2013)

Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa sebenarnya pengelolaan objek wisata Pantai Seruni dikelola sepenuhnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. SDKP terkait hanya melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Pantai Seruni.

Mengutip dari semua hasil wawancara diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa objek wisata Pantai Seruni dalam pengembangannya dikerjakan oleh banyak SKPD terkait dan ini mampu membangun kerjasama yang baik dalam proses pengembangannya. Dan dijelaskan juga bahwa SKPD terkait berperan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata Pantai Seruni.

2. Faktor Penghambat

2.1. Keterbatasan Dana

- a. Dana dalam pengelolaan objek wisata sangat penting.

Setiap objek wisata membutuhkan dana yang besar dalam pengelolaannya. Karena objek wisata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata di objek wisata tersebut. Ketika semua itu tidak terpenuhi, maka objek wisata tersebut tidak akan banyak peminatnya. Dan ini yang menjadi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Pantai Seruni. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa:

"... masalah keterbatasan dana adalah masalah klasik yang dihadapi semua objek wisata dalam proses pengelolaannya. Namun kita harus tetap berusaha agar target kita pada tahun 2014 ini Pantai Seruni sudah rampung pembangunannya" (wawancara dengan HZ, tanggal 13 Mei 2014)

Hasil wawancara tersebut di atas, menegaskan bahwa benar keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam pengelolaan objek wisata Pantai Seruni. Namun tidak menjadi penghalang untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng untuk mengelola objek wisata Pantai Seruni.

Apabila Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mengandalkan APBD dalam pengelolaan objek wisata Pantai Seruni itu sangat sulit dalam pelaksanaannya. Objek wisata yang besar seperti Pantai Seruni akan

memakan banyak anggaran daerah, sedangkan masih banyak urusan-urusan lain yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah secara umum. Dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata Disbutpar yang mengatakan bahwa:

“...yang jadi kendala dalam pengelolaan objek wisata ini yaitu pendanaan dari APBD yang kurang maksimal karena kalau kita menunggu itu akan lambat, kita menunggu lagi APBD tahun depan. Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari APBD maka akan lambat proses pembangunannya.” (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa apabila Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mengandalkan APBD, maka yakinlah bahwa pengelolaan objek wisata Pantai Seruni ini akan lambat, dan tidak mencapai target yang diinginkan.

Merangkum dari semua hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa memang dana menjadi kendala yang dialami pemerintah dalam proses pengelolaan objek wisata Pantai Seruni ini.

b. Tidak Adanya Kerjasama Dengan Pihak Swasta

Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan objek wisata khususnya objek wisata Pantai Seruni memang harus dilakukan agar lebih cepat pembangunannya dengan suntikan dana dari pihak swasta. Namun ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan alasan tidak adanya ruang untuk mereka menanamkan modalnya. Ketersediaan lahan yang terbatas

itulah yang menjadi penyebabnya. Kepala Bidang Pengembangan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“...kita bukan tidak ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta, tapi kami terkendala di ketersediaan lahan. Ada investor yang ingin membuat *water park*, tapi kita menolak dengan alasan lahan yang masih kurang. Dan sebenarnya ada juga yang ingin membuat panti pijat dan club malam di objek wisata ini, namun kita tolak dengan alasan menjaga nama baik Bantaeng sebagai kota beriman” (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2014).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa Pemerintah Sadar akan pentingnya kerjasama dengan pihak swasta sangat disadari oleh pemerintah daerah yang sebenarnya ingin mengikut sertakan pihak swasta atau investor untuk menanamkan modalnya. Namun kendala tersebut diatas yang menjadi penyebabnya, serta pemerintah menolak adanya sarana yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng juga menyadari pentingnya kerjasama dengan pihak swasta dalam proses pengelolaan objek wisata. Seperti yang dikutip dalam wawancara berikut:

“... sebenarnya sangat bagus apabila kita mendatangkan investor dari luar seperti pihak swasta untuk turut serta dalam pengelolaan objek wisata ini. Namun ada hal yang harus dipertimbangkan dulu sebelum melakukan kerjasama itu” (wawancara dengan HZ , tanggal 13 Mei 2013)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa pemerintah sangat ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Namun ada kendala lain yang tidak memungkinkan untuk saat ini pihak swasta

ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Seruni.

Jadi kerjasama dengan pihak swasta dapat membantu proses pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Seruni. Namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah berhubung Pantai Seruni belum memiliki lahan yang cukup dan pemerintah sangat menjaga nama baik Kabupaten Bantaeng dengan tidak bekerjasama dengan kelompok usaha, yang usahanya berbau maksiat.

2.2 Penyediaan Lahan

a. Ketersediaan Lahan Masih Kurang

Lahan yang ada di Pantai Seruni masih belum cukup luas untuk pengembangan objek wisata ini. Terbukti dengan tidak diterimanya pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Pantai Seruni karena ketersediaan lahan yang kurang untuk mendukung keberadaan pihak swasta tersebut yang ingin membuat *water park* di dalam kawasan objek wisata Pantai Seruni tersebut seperti yang dikutip dari wawancara berikut:

“... sebenarnya kita masih ingin menambah sarana dan prasarana yang ada di objek wisata ini, namun ketersediaan lahan yang menghambat semua itu. Salah satunya kita ingin menghadirkan *water park* di kawasan objek wisata ini namun seperti yang saya katakan tadi, lahan tidak mencukupi untuk itu” (wawancara dengan AH, tanggal 13 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa lahan yang dimiliki oleh objek wisata Pantai Seruni menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan dan pengelolaannya. Ada banyak

sebenarnya yang bisa dihadirkan di objek wisata ini, namun masalah lahan yang tidak begitu luas untuk menghadirkan semua itu.

Seorang pengelola objek wisata Pantai Seruni mengatakan hal yang hampir senada tentang keterbatasan lahan yang dimiliki objek wisata Pantai Seruni. Beliau mengatakan bahwa:

“... sebenarnya objek wisata ini akan lebih menarik minat wisatawan kalau di objek wisata ini ada wahana permainan anak-anak. Karena kalau anak-anak suka dan ingin ke objek wisata ini, pasti orang tuanya juga ikut. Namun masalahnya lahan yang dimiliki tidak mencukupi untuk hal itu. Ini saja yang ada sudah terbatas tempatnya. (wawancara dengan MN, tanggal 13 Mei 2014)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa ketersediaan lahan yang terbatas menghambat hadirnya sesuatu yang mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata di objek wisata Pantai Marina ini.

b. Sarana dan prasarana yang belum tersedia membuat objek wisata tidak begitu maksimal dalam pengelolaannya. Dan itu juga dirasakan oleh pemerintah daerah dalam proses pengelolaan objek wisata Pantai Seruni. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng berikut:

“... sebenarnya kita masih terkendala di sarana dan prasarana yang masih kurang. Seperti kita belum memiliki palang otomatis dan *cctv* yang bisa menghitung jumlah kendaraan yang masuk ke objek wisata Pantai Marina agar tidak ada yang lolos dari pengawasan petugas” (wawancara dengan HZ, pada tanggal 13 mei 2013)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa Pantai Seruni masih butuh sarana yang mampu membantu pemerintah agar pengelolaan yang dilakukan lebih maksimal.

Walaupun sarana dan prasarana yang ada di objek wisata Pantai Seruni masih terbatas itu tidak mengurangi semangat pemerintah dalam mengelola objek wisata Pantai Seruni ini karena memang objek wisata Pantai Seruni ditargetkan akan rampung pada tahun 2015 mendatang, pemerintah daerah akan selalu berusaha melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan objek wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi:

“...kami akan selalu berusaha untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Marina di Kabupaten Bantaeng”
(wawancara dengan Anwar Hamido, tanggal 13 Mei 2013)

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa dapat kita lihat keseriusan pemerintah daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam objek wisata Pantai Seruni dalam rangka meningkatkan usaha pengelolaan objek wisata ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya yakni mengenai kemitraan pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : a) Dari tiga bentuk Kemitraan yang di terapkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kemitraan yang paling dominan dalam penelitian ini adalah Kemitraan *Partnership*. b) Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat membuat sebuah kebijakan untuk peningkatan kebersihan dan keindahan di objek wisata Pantai Seruni. c) Pemerintah dan Kelompok Masyarakat menghimbau kepada seluruh jajaran yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan Objek wisata Pantai Seruni ini untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kerjanya sesuai dengan Visi dan Misi. d) dengan terbentuknya kerjasama sama antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat ini, masyarakat umum yang ada di kota bantaeng secara perlahan mulai menyadari akan pentingnya kebersihan dan hidup sehat.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat : a) Letak Geografis, letak Pantai Seruni yang dekat dari jalan raya dan berada tepat di pesisir kota Kabupaten Bantaeng. b) kesadaran Masyarakat yang mulai tumbuh

akan pentingnya menjaga kebersihan. c) terjalannya komunikasi antara Dinas Pariwisata dengan Instansi lain yang terkait. d) karna lahan yang masih kurang, mengakibatkan sarana dan prasarana di Pantai Seruni ini belum memadai, hal ini diakibatkan karna anggaran pendapatandaerah belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di Pantai Seruni dan tidak adanya kerja sama dengan pihak swasta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata) Kabupaten Bantaeng agar pelaksanaanya sesuai dengan yang telah di tuangkan dalam RIPDA Kabupaten Bantaeng.
2. Diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata yang belum rampung sampai saat ini
3. Perlunya penambahan pusat informasi pariwisata demi kemudahan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Objek wisata Pantai Seruni, karena pusat informasi pariwisata sangat penting untuk pengembangan dan pengelolaan objek wisata.
4. Kinerja para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Bantaeng khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar ditingkatkan lagi, meskipun saat ini kinerjanya cukup memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Gaya Media. Yogyakarta
- Ankie, M, M. 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Donggasilomba, D.B. 2011. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Fisipol Unismuh. 2013. *Pedoman Penulis Proposal Penelitian dan Skripsi*. Badan Penerbit Universitas Muhammadiyah. Makassar
- Gunawan, M, P. 2000. *Pengelolaan Pariwisata*. Andi. Jakarta
- Linton Ralph. 1986. *Antropologi Penyelidikan tentang Manusia, Alih Bahasa*. Firmansyah: Jammers. Bandung
- Nur Arifin, H, M. 1997. *Ilmu Sosial Pasar*. Pustaka Setia. Jakarta
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian TUGas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng
- Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032
- PP RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional
- Pitana I Gede, dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Edisi Pertama Andi. Jakarta
- Siagian, Sondang. 2007. *Organisasi Kepempinan dan Perilaku Administrasi*. PT Gunung Agung. Jakarta
- Soekanto Soerjono. 1982. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat: Ghali Indonesia*. Jakarta
- Taneka, Soleman, B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. CV Rajali. Jakarta
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)

Wahab Salah. 1992. *Pemasaran Pariwisata*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Andi. Yogyakarta

Wibisono Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Publishing*. Gresik



DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

NO	Nama	Inisial	Umur	Jabatan/Pekerjaan	Ket
1	H.Hartawan Zaenuddin SH.MH	HZ	54	K. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab, Bantaeng	13 Mei 2014
2	Anwar Hamido	AH	50	K. Bidang Pengembangan Dan promise Pariwisata Kab. Bantaeng	13 Mei 2014
3	Karyono	KY	49	K. Kelurahan Pallantikang	15 Mei 2014
4	Munir	MN	38	Laskar Kebersihan	13 Mei 2014
5	Baharuddin	BR	39	Tokoh Masyarakat Sekitar pantai Seruni	15 Mei 2014
6	Muh. Nasir	MS	51	K. Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni	17 Mei 2014
7	Ridwan	RW	28	Laskar Kebersihan	13 Mei 2014
8	Ramlan	RL	31	Laskar Kebersihan	13 Mei 2014





**JURUSAN ILMU PRMERINTAHAN, FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS
MUHAMMADIAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin KM. 7 Telp. 0411-86697. Makassar 90221

Bapak/Ibu Yang Saya Hormati

Saya atas nama Ulil Amri Syam Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar . Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan Kemitraan Pemerintah daerah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni di Kab. Bantaeng. Dimana penelitian ini hanya bertujuan untuk kepentingan penelitian semata dalam menyusun Skripsi.

Atas bantuan, ketersediaan waktu, dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih

WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Hari/tgl :

Lokasi :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/Pekerjaan :

**B. Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam
Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng**

DAFTAR WAWANCARA

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>- Kebijakan seperti apa yang di keluarkan pemerintah dalam pengembangan pengelolaan pariwisata di kabupaten bantaeng</p> <p>a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata</p> <p>b) Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata/ODTW dan pelestarian budaya.</p>	<p>Informan 1: kemampuan dan keterampilan aparatur harus ditingkatkan agar dalam tugasnya dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan tugas yang mereka emban masing-masing</p> <p>Informan 2: di daerah pantai seruni sana pada umumnya melibatkan berbagai elemen masyarakat kecil di dalam melakukan aktifitas jual jualan dalam hal ini adalah kuliner, sehingga dengan demikian, bahwa pengembangan dan pembinaan objek wisata di Pantai Seruni itu lebih kita arahkan kepada pembinaan wisata-wisata <i>kuliner</i></p>
2.	<p>- Pola kerja sama seperti apa yang di lakukan antara dinas pariwisata dan instansi lainnya terkait dalam pengelolaan kebersihan pantai seruni</p>	<p>Informan 1: jadi pemerintah kabupaten bantaeng di dalam melakukan kerja sama itu senantiasa memiliki komitmen untuk selalu bersinergi baik antara Dinas Pariwisata, Bapedalda maupun dinas-dinas yang lainnya, jadi pemerintah kabupaten Bantaeng itu adalah satu <i>time work</i> atau satu kesatuan sehingga di dalam menyelenggarakan kegiatan kebersihan, pariwisata dan lainnya. Artinya jika kami memiliki suatu permasalahan semua komponen, kepala SKPD atau dinas tertentu pasti turun tangan, jadi sinergitas yang di turunkan oleh Prof. Nurdin ini kepada setiap SKPD, senantiasa melahirkan sebuah <i>time work</i> yang kuat dan itu adalah system</p> <p>Informan 2: jadi dari segi administratif keuangan di lakukan langsung oleh pihak Bapedalda, jadi pengajiannya, jaminan kerjanya, itu Bapedalda yang menangani. Tapi persoalan- persoalan</p>

	<p>3. - Adakah program baru atau upaya-upaya pemerintah menyangkut para lascar kebersihan dalam menjaga kebersihan di pantai seruni</p>	<p>pembinaannya, baik yang melakukan sebagai petugas kebersihan maupun masyarakat yang menikmati obyek wisata itu adalah perannya pariwisata.</p> <p>Informan 1: upaya- upaya yang kita luncurkan adalah senantiasa memberikan hadiah kepada lascar kebersihan yang memiliki prestasi lebih dari para lascar yang lainnya, bahkan bapak Bupati senantiasa memberikan hadiah seperti umroh bagi para lascar kebersihan yang memiliki prestasi lebih, upaya lainnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya nilai kebersihan sehingga Inshaallah kedepan masyarakat akan semakin sadar untuk mencintai kotanya dan menjadikannya semakin bersih dan secara tidak langsung pemerintah telah memberdayakan masyarakat</p> <p>Informan 2: disinilah peran dari dinas pariwisata, tetap melakukan pembinaan dan sosialisasi menyangkut tentang arti pentingnya menjaga kebersihan, agar kebersihan itu tumbuh dan berkembang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dari segi kesadarannya</p>
	<p>4. - Pihak Kelurahan</p> <p>a) seperti apa Peran yang dijalankan dari pihak kelurahan menyangkut dalam pengelolaan objek pariwisata Pantai Seruni</p> <p>b) seperti apa Kerjasama pihak kelurahan dengan para pengelola Pantai Seruni dan para lascar kebersihan</p>	<p>Jadi pemerintah kelurahan dalam hal ini men-support apa-apa yang sudah ditetapkan atau yang direncanakan oleh kepala-kepala atau kantor-kantor dinas yang berkompetensi atau berkaitan dengan Pantai Seruni itu.</p> <p>Jadi sehubungan dengan yang tadi, pemerintah kelurahan sebagai penanggung jawab umum, jadi dalam hal kerja sama ini apa yang sudah dicanangkan atau ditetapkan sebagai program</p>

	<p>c) bagaimana harapan pihak kelurahan terhadap pantai seruni kedepannya</p>	<p>kerja oleh Bapedalda maupun Dinas Pariwisata itu kita support dan membantu memelihara, melihat, mengamankan, dan melaporkan kepada dinas yang bersangkutan</p> <p>Jadi harapan kami dalam hal ini ingin memanfaatkan organisasi-organisasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan segenap ruang lingkup pariwisata mulai dari pedagang kecil sampai pedagang-pedagang menengah yang bisa memanfaatkan potensi ekonomi di Pantai Seruni itu melalui organisasi-organisasi masyarakat seperti LPM</p> <p>Kemudian PNPM. Inilah sementara dalam peninjauan dan perencanaan untuk mensinergikan bagaimana masyarakat bisa juga menikmati potensi ekonomi yang ada di Pantai Seruni ini</p>
<p>5.</p>	<p>- Laskar Kebersihan</p> <p>a) Apa yang melatar belakangi terbentuknya laskar kebersihan (wawan cara dengan Kepala Dinas Pariwisata)</p> <p>b) Hal apa yang mendasari sehingga para petugas kebersihan yang berada di pantai seruni ini mengambil profesinya sebagai tukang sapu bersih</p>	<p>Jadi yang melatar belakangi adalah bahwa kebersihan itu adalah kebutuhan sehingga harus kita lakukan karena baik di dalam agama islam dikatakan bahwa bersih itu sebahagian dari iman begitu pula dengan agama lain, dan ketika kita ingin hidup sehat maka kebersihan ini harus tetap dijaga</p> <p>Jadi dulu itu kan ada terdengar kabar pengangkatan PNS bagi para masyarakat yang mau menjadi petugas laskar kebersihan baru di dengar juga kalo lama maki kerja bisa maki juga di angkat jadi honor dulu baru PNS trus gajinya juga memungkinkan jadi itumi yang mendasari kita semua mengambil profesi ini</p>

	<p>c) Sejak kapan Laskar Kebersihan ini terbentuk</p> <p>d) Bagaimana pola jam kerja dari laskar kebersihan</p> <p>e) Berapa honor atau gaji para laskar kebersihan</p> <p>f) Apa hambatan sekaligus harapan para laskar kebersihan ini kedepannya</p>	<p>Laskar kebersihan ini dibentuk mulai sejak tahun 2008, begitu bapak Bupati terpilih maka sejak itulah laskar kebersihan ini terbentuk dan mulai di rambukkan agar bagaimana caranya kabupaten Bantaeng ini bisa menjadi kabupaten yang bersih, dan Insyaallah karna ini adalah sebuah sistem maka akan berjalan secara terus menerus dan kabupaten Bantaeng akan memiliki nilai-nilai kejayaan pada masa yang akan datang</p> <p>“... jadi jam kerjanya disini terbagi tiga, ada yang masuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi mulai dari jam 5 atau habis sholat subuh sampai jam 9, kalau yang masuk siang mulai dari jam 1 sampai jam 5, terus yang masuk malam itu mulai dari jam 7 sampai jam 11, nanti bersihkan semua baru pulang ke rumah masing-masing</p> <p>Jadi gaji kami itu tergantung dari lamanya kami bekerja, kalau orang lama bisa sampai di atas satu juta tapi kalo orang baru masih Rp 800.000. Terus ada juga bonus pertahun tergantung dari kebijakan pemerintah apa lagi kalau berhasil dapat adipura bisakah dapat tip langsung dari bapak Bupati bisa sampai 5 juta per orang bahkan ada yang dikasi naik umroh ke Mekah kalo bagus cara kerjanya atau berprestasi di kawasannya juga membersihkan</p> <p>Jadi selama jadi petugas kebersihan disini belum pernah pakii juga dapat hambatan karna lancar semuanya baik gajinya, jam kerjanya apa lagi kan masyarakat kan mulai juga sadar tentang kebersihan toh jadi kita juga sebagai petugas kebersihan tidak terlalu capek</p>
--	--	--

		<p>maki membersihkan...” (wawancara dengan Munir 15 Mei 2014)</p> <p>terus kalau masalah kedepan mudah-mudahan gajinya dinaikkan terus banyak bonus-bonus sama ada juga tunjangannya, sama masyarakatka juga semakin sadarki akan pentingnya kebersihan ituji harapan kami</p>
<p>6.</p>	<p>- Tokoh Masyarakat</p> <p>a) Pedapat para tokoh masyarakat mengenai keberadaan para Laskar Kebersihan</p> <p>b) Bagaimana harapan seorang tokoh masyarakat kedepannya mengenai pengelolaan kebersihan di pantai seruni ini</p>	<p>Yaa bagi kami luar biasa karna memberi sebuah pelajaran bagi masyarakat yang biasanya membuang sampah sembarangan dan dengan adanya laskar kebersihan ini terkait dengan Dinas Kebersihan atau Bapedalda itu memberikan sebuah pemahaman dan pola fikir yang bagus dan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat lagi</p> <p>Jadi apa yang sudah ada pada hari ini terus dikembangkan dan diperindah lagi tempat sampahnya supaya gairah masyarakat untuk membuang sampah di tempat sampah itu memiliki daya tarik tersendiri, terus yang kedua tetap dipertahankan kalau perlu di tingkatkan kembali dengan cara menambah personil di setiap titik yang ada di kawasan-kawasan yang sifatnya seperti di tempat wisata pantai seruni ini</p>
<p>7.</p>	<p>- Faktor Pendukung</p> <p>a) Seperti apa kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai seruni</p>	<p>Kami sangat bangga dengan masyarakat karena mereka mendukung sepenuhnya keberadaan objek wisata Pantai Seruni dan mampu menjaga kebersihan dan kelestarian di kawasan objek wisata tersebut dan juga pengelola objek wisata. Karena mereka dengan</p>

	<p>b) bagaimana letak geografis atau akses jalan menuju pantai seruni tersebut</p> <p>c) Bagaimana bentuk informasi dan kordinasi antara dinas pariwisata dan SKPD lainnya yang terkait</p>	<p>kesadaran sendiri mau membantu untuk menjaga kebersihan di sekitar objek wisata tanpa ada perintah langsung dari pihak tertentu</p> <p>Kenapa Pantai Seruni sekarang kita anggap sebagai unggulan, karena di sana dekat di jalan negara, kemudian mudah dijangkau, mudah dilihat. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di sulawesi-selatan ini, yang paling dekat dari jalan raya kan, yang komplit semacam itu. Ada di pangkep, dekat memang dari jalan raya, tapi bukan jalan negara. Sedangkan Pantai Marina dekat dengan jalan negara. Ini bukan jalan provinsi dan bukan jalan nasional, tetapi jalan negara</p> <p>Dan yakin maki bahwa pengembangan objek wisata Pantai Seruni itu multi SKPD, keroyokan. PU masuk, infrastruktur pariwisata dengan kesiapan kawasan, masuk Bapedalda dengan penataan kelistrikan dan taman-taman, masuk koperasi dengan pembinaan UKM, masuk penanggulangan bencana dengan menanggulangi kerusakan-kerusakan akibat abrasi. Masuk organisasi wanita PKK untuk membimbing kita punya kader-kader di sana, masuk Perindag untuk membikin kawasan tempat makan dan minum itu di depan, untuk persinggahan. Masuk Dinas Sosial lagi sekarang untuk membangun BLK Internasional. Jadi komplit dan saya pikir efektif, karena kita terbangun dalam <i>team work</i>, tim kerja. Kita bangun sistem. Jadi pelaksanaan kegiatan kita kedepan bisa mencapai target yang diinginkan</p>
--	---	--

8.	<p>- Factor Penghambat</p> <p>a) Bagaimana pendanaan dalam pengelolaan objek wisata pantai seruni ini</p> <p>b) Bagaimana penyediaan lahan dalam pengelolaan objek wisata di pantai seruni ini</p>	<p>Informan 1 : Masalah keterbatasan dana adalah masalah klasik yang dihadapi semua objek wisata dalam proses pengelolaannya. Namun kita harus tetap berusaha agar target kita pada tahun 2014 ini Pantai Seruni sudah rampung pembangunannya</p> <p>yang jadi kendala dalam pengelolaan objek wisata ini yaitu pendanaan dari APBD yang kurang maksimal karena kalau kita menunggu itu akan lambat, kita menunggu lagi APBD tahun depan. Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari APBD maka akan lambat proses pembangunannya</p> <p>informan 2: yang jadi kendala dalam pengelolaan objek wisata ini yaitu pendanaan dari APBD yang kurang maksimal karena kalau kita menunggu itu akan lambat, kita menunggu lagi APBD tahun depan. Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari APBD maka akan lambat proses pembangunannya</p> <p>informan 1: sebenarnya kita masih ingin menambah sarana dan prasarana yang ada di objek wisata ini, namun ketersediaan lahan yang menghambat semua itu. Salah satunya kita ingin menghadirkan <i>water park</i> di kawasan objek wisata ini namun seperti yang saya katakan tadi, lahan tidak mencukupi untuk itu</p> <p>informan 2: sebenarnya objek wisata ini akan lebih menarik minat wisatawan kalau di objek wisata ini ada wahana permainan anak-anak. Karena kalau anak-anak suka dan ingin ke objek wisata ini, pasti orang tuanya juga ikut. Namun masalahnya lahan yang dimiliki tidak mencukupi untuk hal itu. Ini saja yang ada sudah terbatas</p>
----	--	--

	<p>c) Tidak ada kah kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta</p> <p>d) Bagaimana dengan persoalan sarana dan prasarana dalam pengelolaan objek wisata di pantai seruni tersebut</p>	<p>tempatnya</p> <p>informan 1: kita bukan tidak ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta, tapi kami terkendala di ketersediaan lahan. Ada investor yang ingin membuat <i>water park</i>, tapi kita menolak dengan alasan lahan yang masih kurang. Dan sebenarnya ada juga yang ingin membuat panti pijat dan club malam di objek wisata ini, namun kita tolak dengan alasan menjaga nama baik Bantaeng sebagai kota beriman</p> <p>informan 2: sebenarnya sangat bagus apabila kita mendatangkan investor dari luar seperti pihak swasta untuk turut serta dalam pengelolaan objek wisata ini. Namun ada hal yang harus dipertimbangkan dulu sebelum melakukan kerjasama itu</p> <p>informan 1: sebenarnya kita masih terkendala di sarana dan prasarana yang masih kurang. Seperti kita belum memiliki palang otomatis dan <i>cctv</i> yang bisa menghitung jumlah kendaraan yang masuk ke objek wisata Pantai Marina agar tidak ada yang lolos dari pengawasan petugas</p> <p>informan 2: kami akan selalu berusaha untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Marina di Kabupaten Bantaeng.</p>
--	---	--

DAFTAR GAMBAR

Foto Pantai Seruni di malam hari



Alun – alun Pantai Seruni



Suasana Pantai Seruni di malam hari



Jejeran cafe Pantai Seruni



Foto wawancara dengan Petugas Kebersihan (Laskar Kebersihan)



RIWAYAT HIDUP



ULIL AMRI SYAM, Lahir pada tanggal 27 Agustus 1991, di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Penulis merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara dari pasangan Syamsuddin dan ST. Rosmah B. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 5 Lembang Cina Kabupaten Bantaeng pada tahun 1997 dan tamat pada tahun 2003, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 2 Kabupaten Bantaeng dan tamat pada tahun 2006, setelah tamat di SLTP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Kabupaten Bantaeng (Sekarang diubah menjadi SMA Negeri 4 Kabupaten Bantaeng) dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2010 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.

